



Implementasi Program BSPS dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Penyediaan Rumah Layak Huni pada Desa Tinatar, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan

Avivatul Zayani¹, M Taufiq², Riko Setya Wijaya³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 15 September 2023

Revised : 22 September 2023

Accepted: 30 September 2023

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah kemiskinan yang cukup tinggi, pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program BSPS mampu membantu dalam meningkatkan kesehatan, kenyamanan, dan tumbuh kembang keluarga. Dengan demikian, maka selanjutnya perekonomian masyarakat dapat terstimulasi dengan meningkatnya produktifitas dari individu yang berada didalamnya, sehingga taraf hidup dan kesejahteraan mereka dapat meningkat. Tumbuh kembang keluarga yang baik juga diharapkan mampu menjadikan anak sebagai penerus keluarga tersebut untuk bersaing dalam dunia kerja dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan mereka.

Keywords: *BSPS, masyarakat berpenghasilan rendah, penanganan kemiskinan ekstrim*

(*) Corresponding Author:

avivatulzayaniiii@gmail.com

How to Cite: Zayani A, Taufiq M, & Wijaya R S. (2023). Implementasi Program BSPS dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Penyediaan Rumah Layak Huni pada Desa Tinatar, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8401610>

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur kondisi suatu negara, tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari kondisi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemiskinan termasuk kedalam salah satu persoalan yang mendasar sehingga menjadi perhatian utama setiap negara, salah satunya adalah Indonesia. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk melanjutkan kehidupan yang dimilikinya, kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks, sehingga perlu untuk segera ditangani oleh pemerintah (Romadhan et al., 2022).

Di Indonesia jumlah penduduk miskin terbilang masih cukup tinggi. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,67 juta jiwa. Pada tahun berikutnya, yakni 2019 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 24,79 juta jiwa. Namun, pada tahun 2020 jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 27,55 juta jiwa akibat adanya pandemi. Selanjutnya, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,50 juta jiwa dan menjadi 26,36 juta jiwa pada tahun 2022.

Dengan jumlah penduduk yang ada dan dengan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, maka pemerintah senantiasa berupaya untuk pemeratakan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin yang besar adalah Kabupaten Pacitan.

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pacitan (Ribu Jiwa) |
|--------------|---|
| 2018 | 78.64 |
| 2019 | 75.86 |
| 2020 | 80.82 |
| 2021 | 84.19 |
| 2022 | 76.93 |

Pemerintah di Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan melakukan pemenuhan atas kebutuhan dasar penduduk. Kebutuhan dasar yang dimaksud dalam hal ini meliputi pemenuhan atas pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal yang layak (Dewa Gede Agung Diasana Putra dan Anak Agung Gde Yana, 2007). Di Indonesia jumlah rumah tidak layak huni per tanggal 15 Juni 2023 mencapai 3.654.400 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia masih cukup banyak masyarakat yang tinggal pada rumah yang tidak layak huni dan harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Rumah yang tidak layak huni akan memberikan dampak yang kurang baik bagi penghuninya. Tempat tinggal yang kurang layak akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan, kenyamanan, tumbuh kembang dan produktifitas penghuni. Oleh sebab itu maka penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya rumah yang layak huni terutama bagi masyarakat dengan penghasilan yang rendah.

Berdasarkan UU no. 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan adanya program BSPS diharapkan nantinya masyarakat di Indonesia dapat memiliki rumah yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin membahas mengenai implementasi program BSPS dalam mengurangi angka kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni di Desa Tinatar, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dimana proses penelitian didasari penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti menentukan cara dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan karena sesuai dengan permasalahan penulis yang bersifat sosial dan dinamis.

Jenis sumber data terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara disebut data primer, data ini bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan peneliti karena lebih bersifat spesifik dan didapatkan secara langsung. Sedangkan data yang diperoleh dari publikasi dan instansi pemerintah disebut sebagai data sekunder (Saputra, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu negara, sehingga dijadikan sebagai salah satu perhatian utama yang harus segera diselesaikan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang mengalami keterbatasan yang terjadi bukan atas kehendak mereka, dengan keterbatasan tersebut, maka mereka juga akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Saputra, 2022).

Setiap masyarakat memiliki hak-hak dasar yang sama dalam hidup, begitu pula dengan masyarakat miskin. Hak-hak yang dimaksud dalam hal ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, dan lingkungan hidup. Untuk menanggulangi kemiskinan terdapat dua cara yakni kebijakan yang secara tidak langsung dan kebijakan yang secara langsung diarahkan kepada peningkatan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (Sari et al., 2022).

Secara umum, dalam pembangunan ekonomi daerah, diperlukan adanya strategi pengembangan fisik untuk meningkatkan daya tarik dan memperbaiki perekonomian daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan aspek-aspek pendukung meliputi pembuatan bank tanah, perencanaan dan pembangunan, penataan kota, pengaturan tata ruang, pengendalian, serta penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik (Djadjuli, 2018).

Di Indonesia tingkat pemenuhan kebutuhan atas perumahan yang layak dan juga terjangkau bagi masyarakat miskin terbilang masih cukup kurang. Untuk itu, maka pemerintah memberikan bantuan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan pada masyarakat miskin dengan memberikan dana bantuan untuk meningkatkan kualitas rumah mereka mejadi layak huni (I Gede Wirya Krishna Arnawa & Ni Luh Karmini, 2020). Bantuan untuk meningkatkan kualitas rumah yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat miskin melalui program BSPS merupakan langkah yang tepat dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk melanjutkan kehidupan yang dimilikinya, kemiskinan masih erat kaitannya dengan pedesaan dan keterbatasan dalam faktor produksi untuk memperoleh pendapatan. Salah satu ciri umum kondisi masyarakat miskin adalah kurangnya akses sarana dan prasarana yang memadai, serta kualitas hunian yang tidak sesuai dengan standar kelayakan.

Rumah yang layak huni menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang, hal ini disebabkan karena rumah yang merupakan tempat dimana individu dan keluarga banyak beraktifitas, Rumah dapat memengaruhi kondisi kesehatan dan produktifitas keluarga, dimana hal tersebut nantinya akan berdampak juga pada kondisi perekonomian keluarga tersebut.

Dengan banyaknya jumlah hunian yang tidak layak di Indonesia dan dengan melihat pentingnya rumah layak huni bagi masyarakat, maka salah satu fokus utama pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan adalah dengan melakukan peningkatan sarana pelayanan dasar dan rumah yang tidak layak huni melalui program BSPS. Program BSPS memberikan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan dan mendorong swadaya dalam

kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat dengan keterbatasan daya beli dengan berpenghasilan di bawah Upah Minimum Pemerintah Daerah (Romadhan et al., 2022).

Pada kuartal 1 tahun 2023 salah satu desa di Kabupaten Pacitan, yakni Desa Tinatar Kecamatan Punung mendapatkan total bantuan program BSPS sebanyak 29 rumah. Desa ini memiliki total penduduk sebanyak 2562 jiwa, dari total penduduk tersebut terdapat sebanyak 934 Kepala keluarga dan 338 diantaranya merupakan keluarga miskin. Pada Desa Tinatar per tanggal 15 Juni 2023 terdapat sebanyak 11 rumah layak tidak layak huni yang telah diperbaiki menggunakan dana desa, 64 rumah tidak layak huni yang telah mendapatkan bantuan BSPS, dan masih terdapat sebanyak 37 keluarga yang menempati rumah tidak layak huni.

Program BSPS mampu membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sebelum memiliki rumah yang layak huni masyarakat miskin akan menempati rumah dengan kondisi yang kurang layak, sehingga kesehatan mereka menjadi kurang baik dan kesejahteraan mereka menurun. Setelah dilaksanakannya program BSPS maka kondisi rumah mereka menjadi lebih baik, bersih, nyaman, dan layak untuk ditempati sehingga kesehatan, produktifitas, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Program BSPS khususnya pada Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting fokus kepada peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang keluarga didalamnya. Rumah dengan kualitas yang kurang layak dan memiliki sanitasi yang buruk akan membuat kesehatan dan tumbuh kembang keluarga, terutama anak menjadi terganggu. Sanitasi yang buruk pada rumah yang tidak layak huni menyebabkan keluarga menjadi rentan sakit, pada anak-anak hal tersebut akan menyebabkan terganggunya penyerapan nutrisi pada tubuh sehingga resiko stunting akan meningkat.

Dengan adanya program BSPS, maka kesehatan, kenyamanan, dan tumbuh kembang dari keluarga tersebut akan menjadi lebih baik. Dengan demikian, maka perekonomian masyarakat dapat terstimulasi dengan meningkatnya produktifitas dari individu yang berada didalamnya, sehingga taraf hidup dan kesejahteraan mereka dapat meningkat. Tumbuh kembang keluarga yang baik juga diharapkan mampu menjadikan anak sebagai penerus keluarga tersebut untuk bersaing dalam dunia kerja dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan mereka.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rumah merupakan aspek yang penting dalam kehidupan. Di Indonesia jumlah rumah tidak layak huni masih terbilang cukup banyak, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni bagi keluarganya. Pemerintah yang sadar akan hal tersebut senantiasa berusaha dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni pada masyarakat, salah satu program yang dibuat dalam hal ini adalah program BSPS. Rumah yang layak huni akan memberikan dampak yang baik bagi penghuninya, rumah memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, produktifitas, dan tumbuh kembang keluarga. Dengan adanya peningkatan aspek-aspek tersebut, maka selanjutnya perekonomian dan kesejahteraan mereka juga akan meningkat.

Program BSPS dinilai mampu menjadi solusi yang tepat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, program ini mendukung adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah untuk bersaing dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam pelaksanaan program BSPS ini kebanyakan dari masyarakat di Desa Tinatar masih mengalami kesulitan dan harus mengeluarkan swadaya yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan akses jalan yang susah untuk menuju rumah para penerima bantuan, sehingga terkadang mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan dalam pengiriman bahan bangunan agar sampai ke depan rumah mereka. Oleh sebab itu, maka diharapkan dalam program bantuan ini selanjutnya dilakukan peningkatan dalam dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

REFERENCES

- Dewa Gede Agung Diasana Putra dan Anak Agung Gde Yana, I. (2007). Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Pemukiman Natak*, 5, 62–108.
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol5(2), hal. 10. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>
- I Gede Wirya Krishna Arnawa, & Ni Luh Karmini. (2020). Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tejakula Buleleng. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 9(12), 2618–2644. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/65362/37649/>
- Romadhan, A. A., Habibah, S., Sihidi, I. T., & Kamil, M. (2022). *Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Tabalong : Sebuah Evaluasi*. 4(1), 26–45.
- Saputra, J. (2022). *Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi*. 6(1), 241–249.
- Sari, W., Prayendi, D. A., Aulia, R. G., Idzni, H., Yunus, S. M., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(1), 1–10.